STRATEGI MONITORING DAN EVALUASI DALAM ADVOKASI KESEHATAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Irfan Sazali Nasution[1], Aginta Nur Amelia Sipahutar[2], Marsha Aulia Syaputri[3], Yolanda Ajeng Ayu Stiawan[4], Selvia Lubis[5], Fatimah Zuhra[6], Natasya Aulia[7], Alifa Fatiha[8]

[1,2,3,4,5,6,7,8*] *Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia,*

Corresponding author: agintaameliasipa@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel
Diterima : 04.06.2026
Disetujui : 07.07.2026
Dipublikasi : 20.08.2026

Kata Kunci : Advokasi Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, Monitoring dan Evaluasi, Percepatan Penurunan Stunting, , Stunting

Abstrak

Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional. Keberhasilan program percepatan penurunan stunting memerlukan advokasi kesehatan yang didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi monitoring dan evaluasi dalam advokasi kesehatan guna mendukung program percepatan penurunan stunting melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Data penelitian diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, dokumen kebijakan, serta laporan lembaga kesehatan yang relevan pada periode 2020–2026. Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar, PubMed, Scopus, dan ScienceDirect. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi monitoring dan evaluasi yang efektif harus dilakukan secara terintegrasi, partisipatif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil. Penggunaan indikator output, outcome, dan impact menjadi instrumen penting dalam mengukur keberhasilan program stunting. Selain itu, penguatan sistem informasi kesehatan berbasis digital, pelibatan kader kesehatan dan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor mampu meningkatkan efektivitas program percepatan penurunan stunting. Namun, implementasi monitoring dan evaluasi masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kualitas data, keterbatasan infrastruktur digital, dan lemahnya koordinasi antar sektor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi sistem informasi kesehatan, dan peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan agar program penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Monitoring and Evaluation Strategis in Health Advocacy to Support the Accelerated Stunting Reduction Program

Abstrak

Stunting remains a major public health problem in Indonesia because it affects the quality of human resources and national development. The success of stunting reduction programs requires effective health advocacy supported by strong monitoring and evaluation systems. This study aims to analyze monitoring and evaluation strategies in health advocacy to support stunting reduction programs through a Systematic Literature Review (SLR) approach. The data were obtained from national and international scientific journals, academic books, policy documents, and health institution reports published between 2020–2026. Literature searches were conducted through Google Scholar, PubMed, Scopus, and ScienceDirect. The findings indicate that effective monitoring and evaluation strategies should be integrated, participatory, data-driven, and result-oriented. The use of output, outcome, and impact

indicators is essential in measuring the success of stunting programs. In addition, strengthening digital-based health information systems, involving health cadres and communities, and improving cross-sector coordination can enhance the effectiveness of stunting reduction programs. However, the implementation of monitoring and evaluation still faces several challenges, including limited human resources, poor data quality, inadequate digital infrastructure, and weak intersectoral coordination. Therefore, strengthening human resource capacity, optimizing health information systems, and improving collaboration among stakeholders are necessary to ensure that stunting reduction programs are implemented effectively and sustainably.

Keyword : *Monitoring And Evaluation, Health Advocacy, Stunting, Public Health, Stunting Reduction Program*

Pendahuluan

Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia (Tjiali & Adam, 2024). Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam jangka waktu panjang, terutama sejak periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun (Dewi et al., 2023). Kondisi ini ditandai dengan tinggi badan anak yang berada di bawah standar usianya berdasarkan indikator Height-for-Age Z-Score (HAZ) menurut standar pertumbuhan anak yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO). Periode 1.000 HPK merupakan fase kritis dalam pertumbuhan dan perkembangan anak karena pada masa tersebut terjadi perkembangan otak, sistem imun, serta pertumbuhan fisik yang sangat pesat (Gunardi, 2021). Kekurangan asupan gizi dan paparan lingkungan yang tidak sehat pada periode ini akan memberikan dampak jangka panjang yang sulit diperbaiki pada tahap kehidupan berikutnya (Jumarni et al., 2026).

Stunting tidak hanya dipahami sebagai persoalan antropometri semata, melainkan juga mencerminkan akumulasi berbagai masalah sosial, ekonomi, lingkungan, dan kesehatan yang saling berkaitan. Anak yang mengalami stunting umumnya tumbuh dalam kondisi rumah tangga dengan akses terbatas terhadap pangan bergizi, sanitasi layak, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan (Arring & Winarti, 2024). Oleh karena itu, stunting sering disebut sebagai indikator ketimpangan pembangunan manusia karena menggambarkan rendahnya kualitas hidup masyarakat secara multidimensional (Amran et al, 2025). Dalam konteks kesehatan masyarakat, stunting menjadi masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh faktor langsung maupun tidak langsung, seperti rendahnya status gizi ibu selama kehamilan, kurang optimalnya pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, rendahnya kualitas makanan pendamping ASI, tingginya angka infeksi berulang pada anak, kemiskinan, serta rendahnya tingkat pendidikan keluarga (Matlilla & Haryati, 2024).

Secara global, stunting masih menjadi salah satu fokus utama agenda pembangunan kesehatan dunia. World Health Organization (2024) menempatkan stunting sebagai salah satu bentuk malnutrisi kronis yang memiliki dampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia. Anak yang mengalami stunting tidak hanya mengalami hambatan pertumbuhan fisik, tetapi juga mengalami gangguan perkembangan kognitif, keterlambatan perkembangan motorik, penurunan kemampuan belajar, serta peningkatan risiko penyakit tidak menular pada usia dewasa (Imeldawati, 2025). Stunting berkaitan erat dengan rendahnya kemampuan akademik anak, menurunnya produktivitas tenaga kerja, serta meningkatnya risiko kemiskinan antargenerasi (Mulyani et al., 2025). Stunting bukan hanya persoalan kesehatan individu, tetapi juga ancaman terhadap pembangunan ekonomi, produktivitas nasional, dan daya saing bangsa di masa depan.

Dampak stunting terhadap pembangunan sumber daya manusia sangat signifikan karena kualitas generasi masa depan sangat dipengaruhi oleh status kesehatan dan gizi sejak usia dini. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang lebih rendah dibandingkan anak yang tumbuh normal (Imeldawati, 2025). Gangguan perkembangan otak akibat kekurangan gizi kronis pada masa awal kehidupan dapat menyebabkan menurunnya kemampuan berpikir, konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan pemecahan masalah (Mulyana et al., 2025). Kondisi tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap capaian pendidikan, produktivitas kerja, dan pendapatan individu ketika dewasa. Dalam jangka panjang, tingginya prevalensi stunting dapat menyebabkan kerugian ekonomi nasional karena menurunkan kualitas tenaga kerja dan meningkatkan beban pembiayaan kesehatan negara. Oleh sebab itu, upaya percepatan penurunan stunting menjadi investasi strategis dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Di Indonesia, stunting masih menjadi isu prioritas nasional dalam pembangunan kesehatan dan pembangunan manusia. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan strategis telah menempatkan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu agenda utama pembangunan nasional. Tingginya prevalensi stunting di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensional yang saling berkaitan, seperti kemiskinan, ketahanan pangan rumah tangga yang rendah, rendahnya akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, praktik pengasuhan yang kurang optimal, rendahnya kualitas sanitasi lingkungan, serta terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai gizi dan kesehatan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa stunting bukan merupakan masalah tunggal yang dapat diselesaikan hanya melalui intervensi kesehatan, melainkan membutuhkan pendekatan lintas sektor yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Selain faktor gizi, aspek sosial budaya juga turut memengaruhi tingginya angka stunting di Indonesia. Masih terdapat berbagai praktik budaya yang kurang mendukung kesehatan ibu dan anak, seperti pemberian makanan tambahan yang tidak sesuai usia, rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan selama kehamilan, serta kurangnya pemahaman keluarga mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang (Cahyaningrum & Triana, 2026). Di beberapa wilayah, akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan sanitasi layak juga masih terbatas, terutama di daerah terpencil dan wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Ketimpangan pembangunan antarwilayah menyebabkan upaya penurunan stunting menghadapi tantangan yang berbeda-beda pada setiap daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan geografis masyarakat setempat.

Dalam rangka mempercepat penurunan stunting, pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik meliputi peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemberian suplemen gizi, promosi ASI eksklusif, imunisasi, serta

pemantauan pertumbuhan balita (Yuza et al., 2025). Sementara itu, intervensi sensitif dilakukan melalui peningkatan akses air bersih dan sanitasi, perlindungan sosial, pendidikan kesehatan, pemberdayaan perempuan, serta peningkatan ketahanan pangan masyarakat (Sutiyono et al., 2025). Pelaksanaan program tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta sektor swasta. Sinergi lintas sektor menjadi faktor penting karena akar permasalahan stunting sangat kompleks dan saling berkaitan.

Salah satu pendekatan strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program percepatan penurunan stunting adalah advokasi kesehatan. Advokasi kesehatan merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan publik, meningkatkan komitmen politik, memperkuat dukungan masyarakat, serta mendorong perubahan perilaku yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat (Aris & Lingkar Edukasi Indonesia, 2024). Dalam konteks stunting, advokasi kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai upaya membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pencegahan stunting sejak dini. Advokasi kesehatan dilakukan melalui berbagai strategi, seperti kampanye kesehatan, edukasi masyarakat, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan kerja sama lintas sektor.

Advokasi kesehatan menjadi sangat penting karena keberhasilan program penurunan stunting sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai gizi, sanitasi, pola asuh anak, dan pentingnya pemeriksaan kesehatan selama kehamilan sering kali menjadi hambatan dalam implementasi program stunting (Sarumaha et al., 2026). Oleh sebab itu, advokasi kesehatan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang, pemberian ASI eksklusif, pemanfaatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, advokasi kesehatan juga berperan dalam mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran, memperkuat kebijakan kesehatan, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang mendukung percepatan penurunan stunting.

Meskipun advokasi kesehatan memiliki peran strategis dalam mendukung program stunting, keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada efektivitas sistem monitoring dan evaluasi yang digunakan. Monitoring dan evaluasi merupakan komponen penting dalam manajemen program kesehatan karena berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan, target, dan indikator yang telah ditetapkan (Fardiansyah et al., 2022). Monitoring dilakukan secara berkala untuk mengamati perkembangan program, mengidentifikasi hambatan implementasi, serta memastikan penggunaan sumber daya secara efektif. Sementara itu, evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan program, efektivitas intervensi, relevansi kebijakan, efisiensi pelaksanaan, serta keberlanjutan program dalam jangka panjang (Zahroh & Hilmiyati, 2024).

Dalam konteks advokasi kesehatan untuk percepatan penurunan stunting, monitoring dan evaluasi memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengukur sejauh mana kegiatan advokasi mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat dukungan kebijakan, serta mendorong perubahan perilaku kesehatan. Sistem monitoring dan evaluasi yang baik memungkinkan pengambil kebijakan untuk memperoleh data yang akurat dan berkelanjutan mengenai capaian program, tingkat partisipasi masyarakat, efektivitas media komunikasi, serta dampak intervensi terhadap penurunan prevalensi stunting. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga membantu dalam proses pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy) sehingga program yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Namun demikian, implementasi monitoring dan evaluasi dalam program advokasi kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang sering ditemukan antara lain keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kualitas data, lemahnya koordinasi lintas sektor, kurang optimalnya sistem pelaporan, serta terbatasnya indikator evaluasi yang mampu mengukur dampak advokasi secara komprehensif. Selain itu, evaluasi terhadap efektivitas advokasi kesehatan sering kali lebih berfokus pada output kegiatan dibandingkan perubahan perilaku dan dampak jangka panjang terhadap penurunan stunting. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan strategi monitoring dan evaluasi menjadi kebutuhan penting dalam mendukung keberhasilan program percepatan penurunan stunting.

Berbagai penelitian mengenai stunting telah banyak dilakukan, baik yang membahas faktor risiko, intervensi gizi, implementasi kebijakan kesehatan, maupun strategi penanganan stunting berbasis masyarakat. Namun, kajian yang secara khusus membahas strategi monitoring dan evaluasi dalam advokasi kesehatan untuk mendukung percepatan penurunan stunting masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek intervensi gizi dan layanan kesehatan, sementara kajian mengenai efektivitas sistem monitoring dan evaluasi dalam mendukung keberhasilan advokasi kesehatan belum banyak dianalisis secara mendalam dan sistematis. Padahal, keberhasilan advokasi kesehatan sangat dipengaruhi oleh kemampuan program dalam melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.

Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut melalui pendekatan studi literatur. Studi literatur penting dilakukan untuk mensintesis berbagai hasil penelitian, teori, dan kebijakan terkait strategi monitoring dan evaluasi advokasi kesehatan dalam program percepatan penurunan stunting. Melalui kajian literatur yang komprehensif, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang

lebih mendalam mengenai model monitoring dan evaluasi yang efektif, indikator keberhasilan advokasi kesehatan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi program stunting.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi monitoring dan evaluasi dalam advokasi kesehatan guna mendukung program percepatan penurunan stunting melalui pendekatan studi literatur. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan konsep monitoring dan evaluasi program kesehatan, khususnya dalam konteks advokasi kesehatan dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi bagi pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat efektivitas program penurunan stunting di Indonesia secara berkelanjutan.

Bahan dan Metode

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) atau studi literatur sistematis untuk menganalisis strategi monitoring dan evaluasi dalam advokasi kesehatan guna mendukung program percepatan penurunan stunting. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif, sistematis, dan berbasis bukti ilmiah terhadap berbagai hasil penelitian yang relevan.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, laporan lembaga kesehatan, dokumen kebijakan pemerintah, serta publikasi organisasi internasional terkait kesehatan dan gizi. Penelusuran literatur dilakukan melalui beberapa basis data ilmiah, yaitu Google Scholar, PubMed, Scopus, dan ScienceDirect. Proses pencarian menggunakan kata kunci seperti "monitoring and evaluation", "health advocacy", "stunting reduction", "program evaluation", serta kata kunci dalam bahasa Indonesia seperti "monitoring dan evaluasi stunting", "advokasi kesehatan", dan "program percepatan penurunan stunting".

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: (1) artikel yang membahas monitoring dan evaluasi program kesehatan atau stunting; (2) penelitian terkait advokasi kesehatan dalam konteks kesehatan masyarakat; (3) artikel yang diterbitkan pada tahun 2020–2026; (4) artikel berbahasa Indonesia atau Inggris; dan (5) artikel tersedia dalam bentuk full text. Adapun kriteria eksklusi meliputi artikel yang tidak relevan dengan topik penelitian, artikel duplikat, artikel opini tanpa data empiris, serta publikasi yang tidak melalui proses peer review.

Tahapan penelitian dilakukan melalui identifikasi literatur, seleksi artikel, ekstraksi data, analisis isi (content analysis), dan sintesis hasil penelitian. Artikel yang telah diseleksi dianalisis berdasarkan fokus penelitian, metode yang digunakan, strategi monitoring dan evaluasi, hambatan implementasi, serta implikasi kebijakan. Selanjutnya, hasil penelitian disintesis untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi monitoring dan evaluasi dalam advokasi kesehatan untuk mendukung percepatan penurunan stunting.

Untuk menjaga validitas penelitian, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dari sumber yang berbeda dan memastikan bahwa seluruh referensi yang digunakan berasal dari publikasi ilmiah yang kredibel dan relevan dengan topik penelitian

Hasil Penelitian

Strategi Monitoring dan Evaluasi dalam Advokasi Kesehatan untuk Penurunan Stunting

Monitoring dan evaluasi (M&E) merupakan komponen strategis dalam mendukung keberhasilan advokasi kesehatan pada program percepatan penurunan stunting. Monitoring berfungsi untuk memantau pelaksanaan program secara berkelanjutan, sedangkan evaluasi digunakan untuk menilai tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan keberhasilan program berdasarkan indikator yang telah ditetapkan (Situmorang et al., 2025). Dalam konteks penanganan stunting, monitoring dan evaluasi tidak hanya berperan sebagai alat pengawasan administratif, tetapi juga menjadi instrumen pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam menentukan arah kebijakan kesehatan masyarakat

Strategi monitoring dan evaluasi yang efektif harus bersifat partisipatif, terintegrasi, berbasis data, serta berorientasi pada hasil (result-oriented) (Putera et al., 2026). Pendekatan tersebut diperlukan karena stunting merupakan masalah multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor kesehatan, gizi, sanitasi, pendidikan, ekonomi, dan kondisi sosial budaya masyarakat. Oleh sebab itu, keberhasilan program penurunan stunting memerlukan sistem monitoring dan evaluasi yang mampu menghubungkan berbagai sektor secara terpadu.

Salah satu strategi utama yang banyak diterapkan dalam monitoring dan evaluasi program stunting adalah penggunaan indikator kinerja yang terukur dan sistematis. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur capaian program baik dari sisi input, proses, output, maupun outcome. Beberapa indikator yang umum digunakan meliputi prevalensi stunting, cakupan pemberian ASI eksklusif, tingkat konsumsi gizi seimbang, cakupan imunisasi dasar lengkap, persentase akses air bersih dan sanitasi layak, angka kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam program kesehatan. Penggunaan indikator yang jelas memungkinkan pemerintah dan tenaga kesehatan melakukan pengukuran capaian program secara objektif dan terstandarisasi.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 21,6% pada tahun 2022. Penurunan tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, meskipun angka tersebut masih berada di atas standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu di

bawah 20%. Selain itu, target pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah menurunkan prevalensi stunting hingga mencapai 14%. Data tersebut menunjukkan bahwa monitoring yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas program intervensi gizi spesifik maupun sensitif di berbagai daerah.

Penguatan sistem informasi kesehatan juga menjadi strategi penting dalam monitoring dan evaluasi program stunting. Digitalisasi data kesehatan memungkinkan proses pencatatan, pelaporan, dan analisis data dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Penggunaan sistem informasi berbasis digital mampu meningkatkan kualitas data kesehatan masyarakat karena meminimalkan kesalahan pencatatan manual serta mempercepat distribusi informasi antarinstansi (Istiqamah et al., 2026). Sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi wilayah prioritas stunting, memantau perkembangan program secara real time, serta menentukan kebijakan intervensi yang lebih tepat sasaran.

Dalam implementasinya, pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai platform digital seperti aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) untuk memantau status gizi balita secara berkala (Fitri et al., 2025). Melalui sistem tersebut, data pertumbuhan anak dapat diakses oleh tenaga kesehatan mulai dari tingkat desa hingga nasional. Keberadaan sistem digital ini mendukung proses monitoring yang lebih efektif karena data dapat dianalisis secara cepat untuk mengetahui daerah dengan prevalensi stunting tinggi maupun kelompok masyarakat yang memerlukan intervensi segera. Selain itu, sistem digital juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program kesehatan.

Strategi monitoring dan evaluasi lainnya yang dinilai efektif adalah pendekatan berbasis komunitas melalui pelibatan kader kesehatan dan masyarakat lokal. Kader posyandu memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa (Hutagaol et al., 2025). Mereka berperan dalam pengumpulan data pertumbuhan balita, pelaksanaan penimbangan rutin, edukasi gizi kepada ibu hamil dan ibu balita, serta pelaporan kondisi kesehatan masyarakat kepada puskesmas. Keterlibatan kader kesehatan mampu meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar karena kader memiliki kedekatan sosial dan budaya dengan masyarakat setempat (Wadi & Maksum, 2026).

Pelibatan masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi juga dapat meningkatkan rasa memiliki (sense of ownership) terhadap program kesehatan. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan program, tingkat partisipasi serta keberlanjutan program cenderung meningkat. Partisipasi masyarakat memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga sehingga hambatan pelaksanaan program dapat diidentifikasi lebih cepat. Selain itu, pendekatan partisipatif juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah sehingga advokasi kesehatan menjadi lebih efektif.

Koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam keberhasilan monitoring dan evaluasi program stunting (Rambey & Ginting, 2025). Penanganan stunting tidak dapat dilakukan hanya oleh sektor kesehatan, melainkan membutuhkan keterlibatan sektor pendidikan, pertanian, sanitasi, perlindungan sosial, hingga pemerintahan desa. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara kolaboratif agar seluruh program intervensi dapat berjalan secara sinkron dan saling mendukung. Kurangnya koordinasi antarinstansi sering kali menyebabkan tumpang tindih program, ketidaksesuaian data, serta rendahnya efektivitas intervensi di lapangan.

Selain koordinasi lintas sektor, evaluasi berkala terhadap kualitas implementasi program juga menjadi aspek penting dalam strategi monitoring dan evaluasi. Evaluasi tidak hanya berfokus pada pencapaian target numerik, tetapi juga menilai kualitas layanan kesehatan, efektivitas komunikasi kesehatan, serta perubahan perilaku masyarakat terkait pola makan, sanitasi, dan pengasuhan anak. Evaluasi yang komprehensif memungkinkan pemerintah mengetahui faktor-faktor penghambat maupun pendukung keberhasilan program sehingga kebijakan dapat diperbaiki secara berkelanjutan.

Di sisi lain, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program stunting masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kapasitas kader kesehatan dalam pengelolaan data, keterbatasan infrastruktur digital di daerah terpencil, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga (Agustina et al., 2024). Selain itu, kualitas data yang belum seragam juga menjadi kendala dalam proses pengambilan keputusan. Ketidaktepatan data dapat menyebabkan intervensi program menjadi tidak tepat sasaran sehingga efektivitas penurunan stunting menjadi kurang optimal.

Dengan demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa strategi monitoring dan evaluasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan advokasi kesehatan untuk percepatan penurunan stunting. Penggunaan indikator kinerja yang terukur, penguatan sistem informasi kesehatan berbasis digital, pelibatan masyarakat dan kader kesehatan, serta koordinasi lintas sektor merupakan strategi utama yang dapat meningkatkan efektivitas program. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan akan membantu pemerintah dalam memastikan bahwa setiap intervensi kesehatan berjalan sesuai tujuan dan mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan prevalensi stunting di Indonesia.

Indikator Keberhasilan Program Stunting

Keberhasilan program percepatan penurunan stunting dapat diukur melalui tiga kategori indikator utama, yaitu indikator output, outcome, dan impact (Fadila et al., 2025). Ketiga indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana program yang dilaksanakan mampu mencapai tujuan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang secara efektif dan berkelanjutan. Penggunaan indikator yang terukur

menjadi penting karena program penurunan stunting melibatkan berbagai sektor dan membutuhkan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan efektivitas intervensi yang dilakukan (Palastri & Rosdiana, 2026).

Indikator output merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur hasil langsung dari pelaksanaan program atau kegiatan yang telah dilakukan (Tirta et al., 2025). Indikator ini biasanya berkaitan dengan capaian pelayanan kesehatan, distribusi bantuan gizi, serta pelaksanaan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Beberapa indikator output yang sering digunakan dalam program stunting meliputi jumlah balita yang mendapatkan layanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, jumlah ibu hamil yang memperoleh tablet tambah darah atau suplemen zat besi, jumlah bayi yang menerima ASI eksklusif, cakupan imunisasi dasar lengkap, serta jumlah keluarga yang memperoleh edukasi mengenai gizi seimbang dan pola hidup bersih dan sehat (Fildzah et al., 2020).

Selain itu, indikator output juga dapat dilihat dari jumlah posyandu aktif, tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan kesehatan, serta cakupan intervensi sanitasi dan penyediaan air bersih di wilayah sasaran (Nisa & Sumarni, 2024). Tingginya capaian indikator output menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan target operasional yang direncanakan. Namun demikian, keberhasilan pada tahap output belum tentu secara langsung menunjukkan keberhasilan program dalam menurunkan angka stunting apabila tidak diikuti oleh perubahan perilaku dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Selanjutnya, indikator outcome digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi pada masyarakat sebagai dampak dari pelaksanaan program dalam jangka menengah. Outcome berkaitan dengan perubahan perilaku, peningkatan pengetahuan, serta perubahan kondisi sosial dan kesehatan masyarakat setelah memperoleh intervensi program (Sutanto et al., 2025). Dalam konteks penurunan stunting, indikator outcome meliputi peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang, peningkatan kesadaran ibu hamil terhadap pemeriksaan kehamilan rutin, perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), peningkatan praktik pemberian ASI eksklusif, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan air bersih.

Perilaku masyarakat memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap keberhasilan program penurunan stunting (Rohani et al., 2026). Masyarakat yang memiliki pengetahuan gizi yang baik cenderung lebih mampu memenuhi kebutuhan nutrisi anak dan menjaga pola pengasuhan yang sehat. Selain itu, peningkatan akses sanitasi dan air bersih juga berkontribusi besar terhadap pencegahan infeksi berulang pada anak yang menjadi salah satu faktor penyebab stunting. Oleh karena itu, evaluasi outcome menjadi sangat penting untuk mengetahui apakah program yang dijalankan benar-benar mampu mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih sehat.

Sementara itu, indikator impact merupakan indikator utama yang digunakan untuk menilai dampak jangka panjang dari pelaksanaan program penurunan stunting (Fauzan et al., 2026). Indikator impact berfokus pada perubahan kondisi kesehatan masyarakat secara menyeluruh, terutama terkait status gizi dan kualitas hidup anak (Rani et al., 2025). Beberapa indikator impact yang umum digunakan meliputi penurunan prevalensi stunting, peningkatan status gizi anak, penurunan angka gizi buruk, peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 21,6% pada tahun 2022. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa berbagai program intervensi gizi spesifik dan sensitif mulai memberikan dampak positif terhadap kondisi kesehatan anak di Indonesia. Untuk memperjelas perkembangan prevalensi stunting di Indonesia, berikut disajikan data prevalensi stunting nasional berdasarkan hasil survei kesehatan nasional.

Tabel 1. Analisis Karakteristik Responden

Tahun	Prevalensi Stunting (%)	Keterangan
2018	30,8% (Rskesdas, 2018)	Prevalensi stunting nasional sebelum penguatan percepatan program
2019	27,7% (SSGBI, 2019)	Mulai terjadi penurunan setelah intervensi nasional
2021	24,4% (SSGI, 2021)	Penguatan program lintas sektor
2022	21,6% (SSGIb	Penurunan signifikan prevalensi stunting nasional
Target Nasional	RPJMN 2020-2024	Target pemerintah Indonesia

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Riskesdas 2018; SSGI 2021 dan 2022; RPJMN 2020-2024

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa prevalensi stunting di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan prevalensi dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 21,6% pada tahun 2022 menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan intervensi pemerintah mulai memberikan dampak positif terhadap perbaikan status gizi anak. Penurunan tersebut tidak terlepas dari penguatan program percepatan penurunan stunting melalui pendekatan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang dilakukan secara lintas sektor. Data tersebut juga menunjukkan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi memiliki kontribusi penting dalam mendukung efektivitas program stunting. Monitoring yang dilakukan secara berkala memungkinkan pemerintah dan tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, mengevaluasi capaian program, serta menentukan langkah intervensi yang lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi yang dilakukan secara sistematis membantu pemerintah dalam menilai efektivitas kebijakan dan memperbaiki implementasi program berdasarkan kondisi di lapangan.

Namun demikian, angka tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan batas prevalensi stunting di bawah 20%. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan stunting di Indonesia masih menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian dan penanganan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi yang konsisten tetap diperlukan untuk memastikan target nasional penurunan stunting sebesar 14% dapat tercapai. Keberhasilan pencapaian target tersebut sangat bergantung pada efektivitas sistem monitoring dan evaluasi dalam mendeteksi hambatan pelaksanaan program serta memastikan bahwa seluruh intervensi berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan program stunting sangat dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Larasati et al., 2025). Program yang memiliki sistem monitoring yang baik cenderung lebih mampu mengidentifikasi hambatan implementasi secara cepat sehingga intervensi korektif dapat segera dilakukan. Monitoring yang dilakukan secara berkala memungkinkan pemerintah dan tenaga kesehatan mengetahui perkembangan capaian program di setiap wilayah, mengidentifikasi kelompok masyarakat yang rentan, serta mengevaluasi efektivitas strategi intervensi yang telah diterapkan. Dengan adanya sistem monitoring yang kuat, pemerintah dapat melakukan penyesuaian kebijakan secara lebih responsif berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Selain itu, evaluasi yang dilakukan secara sistematis dapat membantu meningkatkan kualitas kebijakan kesehatan masyarakat. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program lanjutan, pengalokasian anggaran, serta pengembangan strategi intervensi yang lebih tepat sasaran. Evaluasi juga berfungsi sebagai sarana untuk menilai efektivitas program yang telah dilaksanakan sehingga pemerintah dapat mengetahui program mana yang perlu dipertahankan, diperbaiki, atau dikembangkan lebih lanjut (Otaya et al., 2025). Dengan demikian, indikator output, outcome, dan impact tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan program, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengembangan kebijakan percepatan penurunan stunting di Indonesia.

Selain sebagai indikator keberhasilan pembangunan kesehatan, penurunan prevalensi stunting juga mencerminkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara umum. Hal ini karena stunting tidak hanya berkaitan dengan masalah gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sanitasi, pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, akses pelayanan kesehatan, dan pola pengasuhan anak. Oleh sebab itu, upaya percepatan penurunan stunting membutuhkan kerja sama lintas sektor yang terintegrasi serta partisipasi aktif masyarakat agar hasil yang dicapai dapat berlangsung secara berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara konsisten akan membantu memastikan bahwa setiap program intervensi mampu berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Peran Pemerintah, Tenaga Kesehatan, Kader, dan Masyarakat

Keberhasilan monitoring dan evaluasi program percepatan penurunan stunting tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Penanganan stunting merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader kesehatan, serta masyarakat. Pendekatan kolaboratif sangat penting karena stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang bersifat multidimensional dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

Pemerintah memiliki peran strategis sebagai pengambil kebijakan dan koordinator utama dalam pelaksanaan program penurunan stunting. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam penyusunan regulasi, penetapan target nasional, penyediaan anggaran, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi program kesehatan. Sementara itu, pemerintah daerah berperan dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Pemerintah daerah juga bertugas melakukan koordinasi lintas sektor, seperti sektor kesehatan, pendidikan, sanitasi, pangan, dan perlindungan sosial agar program stunting dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

Selain penyusunan kebijakan, pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam penguatan sistem informasi kesehatan dan penyediaan infrastruktur pelayanan kesehatan. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh daerah, termasuk wilayah terpencil, memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan, tenaga medis, serta sistem pencatatan data yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah memperkuat penggunaan sistem digital seperti Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) untuk meningkatkan efektivitas monitoring kondisi gizi balita secara nasional (Ramlan, 2025).

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam pelaksanaan layanan kesehatan dan proses monitoring kondisi gizi masyarakat (Capriani & Rismayana, 2025). Tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, perawat, ahli gizi, dan sanitarian bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, pemantauan pertumbuhan balita, pemberian imunisasi, edukasi gizi, serta pengumpulan data kesehatan masyarakat. Selain itu, tenaga kesehatan juga berperan dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi kesehatan balita dan memberikan rekomendasi intervensi yang sesuai berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan.

Dalam konteks monitoring dan evaluasi, tenaga kesehatan menjadi sumber utama dalam penyediaan data yang akurat mengenai status gizi masyarakat. Data yang dikumpulkan oleh tenaga kesehatan digunakan sebagai dasar dalam penentuan kebijakan dan pelaksanaan intervensi kesehatan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pengelolaan data dan penggunaan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas program stunting.

Di sisi lain, kader kesehatan memiliki peran sebagai ujung tombak pelaksanaan program kesehatan di tingkat komunitas (Hutapea, 2026). Kader posyandu memiliki kedekatan sosial dan budaya dengan masyarakat sehingga lebih mudah dalam melakukan pendekatan edukatif kepada keluarga, khususnya ibu hamil dan ibu balita. Kader kesehatan berperan dalam melakukan penimbangan balita, pencatatan pertumbuhan anak, penyuluhan kesehatan, pemantauan kondisi lingkungan, serta pelaporan kondisi masyarakat kepada puskesmas atau pemerintah desa.

Keberadaan kader kesehatan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan karena kader dianggap lebih memahami kondisi sosial masyarakat setempat. Selain itu, kader juga berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara masyarakat dan tenaga kesehatan sehingga berbagai permasalahan kesehatan dapat diidentifikasi lebih cepat. Namun demikian, efektivitas peran kader sangat dipengaruhi oleh kualitas pelatihan, dukungan fasilitas, serta pendampingan dari pemerintah dan tenaga kesehatan.

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program percepatan penurunan stunting. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat program, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam mendukung perubahan perilaku kesehatan. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, pemeriksaan kesehatan rutin, serta pola asuh anak sangat menentukan keberhasilan penurunan stunting.

Keterlibatan masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi juga dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap program kesehatan (Priadi & Winarti, 2024). Ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan program, tingkat kepatuhan terhadap intervensi kesehatan cenderung meningkat. Selain itu, partisipasi masyarakat memungkinkan terjadinya kontrol sosial yang dapat membantu memastikan program berjalan secara transparan dan tepat sasaran.

Dengan demikian, keberhasilan program percepatan penurunan stunting sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat. Kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan akan memperkuat efektivitas monitoring dan evaluasi sehingga program kesehatan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.

Hambatan Implementasi Monitoring dan Evaluasi Program Stunting

Meskipun monitoring dan evaluasi (M&E) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan program percepatan penurunan stunting, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut keterbatasan sumber daya manusia, kelembagaan, pendanaan, koordinasi

lintas sektor, serta kualitas partisipasi masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kendala-kendala tersebut dapat mengurangi efektivitas program dan menghambat pencapaian target penurunan stunting secara nasional.

Salah satu hambatan utama dalam implementasi monitoring dan evaluasi program stunting adalah keterbatasan sumber daya manusia, terutama di daerah terpencil dan wilayah dengan akses pelayanan kesehatan yang masih rendah (Yeyen et al., 2025). Banyak tenaga kesehatan maupun kader posyandu yang belum memiliki kapasitas memadai dalam pengelolaan data, analisis indikator kesehatan, serta pelaksanaan evaluasi program secara sistematis. Kondisi ini menyebabkan proses monitoring sering kali hanya dilakukan sebatas pencatatan administratif tanpa disertai analisis mendalam terhadap kondisi kesehatan masyarakat.

Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia juga berdampak pada rendahnya kualitas pelaporan data kesehatan. Dalam beberapa kasus, kader kesehatan mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan digital maupun penggunaan aplikasi kesehatan berbasis teknologi informasi. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya pelatihan teknis, rendahnya literasi digital, serta keterbatasan pendampingan dari tenaga kesehatan profesional. Akibatnya, proses pengumpulan data menjadi kurang optimal dan sering menimbulkan keterlambatan pelaporan.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, kualitas data yang rendah juga menjadi permasalahan serius dalam monitoring dan evaluasi program stunting. Ketidaksesuaian data antarinstansi sering kali menyebabkan kesulitan dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan intervensi. Perbedaan metode pencatatan, keterlambatan pembaruan data, serta kurangnya integrasi sistem informasi antar lembaga menyebabkan data yang tersedia sering kali tidak sinkron. Kondisi tersebut dapat menghambat identifikasi wilayah prioritas stunting serta mengurangi ketepatan sasaran program intervensi.

Kualitas data yang kurang akurat dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penentuan kelompok sasaran penerima program bantuan gizi maupun intervensi kesehatan lainnya (Nadiasari et al., 2026). Misalnya, terdapat balita yang mengalami risiko stunting tetapi tidak tercatat dalam sistem pelaporan, sementara di sisi lain terdapat data ganda yang menyebabkan ketidakefisienan distribusi program. Oleh karena itu, penguatan sistem validasi dan integrasi data menjadi kebutuhan penting dalam meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi program stunting.

Hambatan lainnya adalah keterbatasan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Imaduddin et al., 2026). Dalam praktiknya, sebagian besar alokasi anggaran program kesehatan lebih difokuskan pada pelaksanaan intervensi langsung, sedangkan kegiatan monitoring dan evaluasi sering kali belum menjadi prioritas utama. Akibatnya, kegiatan supervisi lapangan, pelatihan kader, pengembangan sistem informasi kesehatan, serta evaluasi berkala tidak dapat dilakukan secara optimal. Keterbatasan pendanaan juga berdampak pada minimnya fasilitas penunjang seperti perangkat digital, jaringan internet, dan sarana transportasi bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil (Rahman, 2025).

Rendahnya koordinasi lintas sektor juga menjadi hambatan yang cukup signifikan dalam implementasi monitoring dan evaluasi program stunting. Penanganan stunting membutuhkan kolaborasi antara berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, dan pemerintahan desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan ego sektoral dan kurangnya sinkronisasi antarinstansi. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program menjadi tidak terintegrasi dan sering terjadi tumpang tindih kebijakan maupun kegiatan di lapangan.

Kurangnya koordinasi juga berdampak pada proses pertukaran data dan informasi antar lembaga. Setiap instansi sering memiliki sistem pelaporan yang berbeda sehingga menyulitkan proses integrasi data secara nasional. Padahal, keberhasilan monitoring dan evaluasi sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat, terpadu, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih kuat dan sistematis agar pelaksanaan program penurunan stunting dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Minimnya pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program stunting (Sugiharto et al., 2025). Meskipun pemerintah telah mengembangkan berbagai sistem digital kesehatan, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak kendala, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal. Keterbatasan akses internet, kurangnya perangkat teknologi, serta rendahnya kemampuan penggunaan aplikasi digital menyebabkan proses digitalisasi data kesehatan belum berjalan secara optimal.

Padahal, pemanfaatan teknologi informasi memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi program kesehatan. Sistem digital dapat mempercepat proses pengumpulan data, meningkatkan akurasi pelaporan, serta mempermudah analisis kondisi kesehatan masyarakat secara real time. Oleh sebab itu, penguatan infrastruktur teknologi informasi dan peningkatan literasi digital tenaga kesehatan maupun kader menjadi langkah penting dalam mendukung efektivitas program penurunan stunting.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam program kesehatan. Sebagian masyarakat masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah mengenai pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak, pemenuhan gizi seimbang, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Faktor sosial budaya, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, serta kepercayaan tradisional juga memengaruhi rendahnya keterlibatan masyarakat dalam program stunting.

Kurangnya partisipasi masyarakat menyebabkan pelaksanaan monitoring di tingkat komunitas menjadi kurang efektif (Roby et al., 2024). Misalnya, masih terdapat orang tua yang tidak rutin membawa anak ke posyandu atau kurang mematuhi anjuran tenaga kesehatan terkait pola makan dan sanitasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan monitoring dan evaluasi tidak hanya bergantung pada sistem administrasi, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat secara menyeluruh.

Bahwa monitoring dan evaluasi program stunting sering kali hanya bersifat administratif dan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Dalam banyak kasus, proses monitoring hanya difokuskan pada pemenuhan laporan kegiatan tanpa disertai analisis mendalam mengenai efektivitas program dan kondisi masyarakat. Akibatnya, hasil evaluasi tidak digunakan secara optimal untuk memperbaiki kebijakan maupun strategi intervensi kesehatan secara berkelanjutan.

Monitoring dan evaluasi yang bersifat administratif cenderung menghasilkan data yang hanya digunakan sebagai formalitas pelaporan kepada instansi atasan. Padahal, fungsi utama monitoring dan evaluasi adalah sebagai instrumen pembelajaran dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi agar hasil evaluasi benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas program kesehatan masyarakat.

Efektivitas Advokasi Kesehatan Berdasarkan Penelitian Terdahulu

Advokasi kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dan penguatan dukungan kebijakan dalam program percepatan penurunan stunting (Maasawet et al., 2025). Advokasi kesehatan merupakan proses strategis untuk memengaruhi kebijakan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta membangun komitmen berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung program kesehatan. Dalam konteks penanganan stunting, advokasi kesehatan berperan penting dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, pola asuh anak, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Advokasi kesehatan yang dilakukan secara intensif mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang, pemberian ASI eksklusif, imunisasi dasar lengkap, serta perilaku hidup bersih dan sehat (Farisni et al., 2025). Edukasi yang dilakukan melalui penyuluhan kesehatan, media sosial, kampanye publik, dan kegiatan komunitas terbukti dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap faktor-faktor penyebab stunting. Peningkatan pengetahuan tersebut berkontribusi terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.

Selain berdampak pada masyarakat, advokasi kesehatan juga memiliki pengaruh besar terhadap penguatan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan program penurunan stunting. Daerah yang memiliki sistem advokasi kesehatan yang baik cenderung memiliki dukungan kebijakan dan alokasi anggaran yang lebih besar untuk program stunting. Advokasi yang efektif mampu mendorong pemerintah daerah menjadikan penanganan stunting sebagai prioritas pembangunan daerah sehingga program intervensi dapat dilaksanakan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Daerah yang memiliki sistem monitoring dan advokasi yang kuat cenderung mengalami penurunan prevalensi stunting yang lebih signifikan dibandingkan daerah dengan sistem monitoring yang lemah (Fitri et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa advokasi kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen penguatan tata kelola program kesehatan. Monitoring dan evaluasi yang baik memungkinkan pemerintah melakukan identifikasi masalah secara lebih cepat sehingga kebijakan intervensi dapat segera disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Selain itu, efektivitas advokasi kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi yang digunakan dalam penyampaian pesan kesehatan. Komunikasi yang jelas, sederhana, dan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat cenderung lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat. Pendekatan komunikasi berbasis budaya lokal juga terbukti mampu meningkatkan efektivitas program edukasi kesehatan karena masyarakat merasa lebih dekat dengan pesan yang disampaikan.

Keterlibatan pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan advokasi kesehatan. Advokasi yang melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, kader posyandu, tokoh masyarakat, organisasi sosial, serta media massa cenderung memiliki dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Kolaborasi antar pihak memungkinkan penyebaran informasi kesehatan dilakukan secara lebih masif dan konsisten sehingga perubahan perilaku masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Namun demikian, efektivitas advokasi kesehatan akan menurun apabila tidak disertai monitoring dan evaluasi yang memadai. Advokasi yang hanya dilakukan secara sesaat tanpa evaluasi berkala cenderung menghasilkan dampak yang kurang berkelanjutan. Tanpa monitoring yang baik, pemerintah akan kesulitan mengetahui sejauh mana perubahan perilaku masyarakat terjadi serta apakah program edukasi yang dilakukan benar-benar efektif dalam menurunkan angka stunting.

Dengan demikian, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa advokasi kesehatan memiliki kontribusi yang sangat penting dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Efektivitas advokasi kesehatan akan semakin optimal apabila didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang kuat, partisipasi aktif masyarakat, koordinasi lintas sektor, serta komitmen pemerintah dalam pelaksanaan program kesehatan secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa monitoring dan evaluasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan advokasi kesehatan untuk program percepatan penurunan stunting di Indonesia. Monitoring berfungsi untuk memantau pelaksanaan program secara berkelanjutan, sedangkan evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, serta dampak program terhadap penurunan prevalensi stunting. Keberadaan sistem monitoring dan evaluasi yang baik memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan memperoleh data yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy). Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi monitoring dan evaluasi yang efektif harus dilakukan secara terintegrasi, partisipatif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil. Penggunaan indikator output, outcome, dan impact menjadi instrumen penting dalam mengukur keberhasilan program stunting secara menyeluruh. Selain itu, penguatan sistem informasi kesehatan berbasis digital seperti e-PPGBM mampu meningkatkan kualitas pencatatan, pelaporan, dan analisis data kesehatan masyarakat sehingga proses monitoring dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan efisien.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan program percepatan penurunan stunting sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader posyandu, dan masyarakat. Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan, pengalokasian anggaran, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi. Tenaga kesehatan dan kader memiliki peran penting dalam pelaksanaan layanan kesehatan, pengumpulan data, edukasi masyarakat, serta pemantauan pertumbuhan balita. Sementara itu, partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor utama dalam mendukung perubahan perilaku kesehatan yang berkelanjutan. Meskipun prevalensi stunting di Indonesia menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, berbagai hambatan implementasi monitoring dan evaluasi masih ditemukan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kualitas dan integrasi data, keterbatasan infrastruktur digital, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, monitoring dan evaluasi masih sering bersifat administratif dan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar evaluasi strategis dalam pengembangan kebijakan kesehatan masyarakat.

Advokasi kesehatan terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat terkait pencegahan stunting. Namun, efektivitas advokasi kesehatan akan lebih optimal apabila didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang kuat, komunikasi kesehatan yang tepat, koordinasi lintas sektor yang baik, serta komitmen pemerintah dalam menjalankan program secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas sistem informasi kesehatan, optimalisasi koordinasi antar sektor, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar monitoring dan evaluasi program stunting dapat berjalan lebih efektif. Dengan sistem monitoring dan evaluasi yang kuat dan berkelanjutan, program percepatan penurunan stunting di Indonesia diharapkan mampu mencapai target nasional serta meningkatkan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Irfan Sazali Nasution, S.Ked., M.Kes selaku Dosen Pengampu yang telah dengan penuh kesabaran dan ketulusan membimbing, memberikan arahan, masukan, serta motivasi selama proses penyusunan penelitian ini. Bimbingan dan ilmu yang diberikan sangat berarti dan menjadi bekal berharga bagi kami dalam menyelesaikan karya ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta dukungan administratif maupun teknis selama proses penelitian dan penyusunan karya ini berlangsung. Tanpa dukungan institusi yang luar biasa ini, proses penyelesaian penelitian tentu tidak akan berjalan dengan lancar.

Referensi

Agustina, D., Maghfirah, S., Harahap, R. S., Azwa, N. A., Mrp, A. D., Amanda, D. F., Purba, F. A., Mrp, F. A. H., Pratama, M. R., Boangmanalu, L. K., Tantri, D. A., & Purba, H. N. (2024). Evaluasi program penanggulangan stunting pada balita. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(2).

Amran, R., Nurwiyeni, N., Pratama, R. R., & Wahyuni, S. (2025). Stunting sebagai ancaman kualitas sumber daya manusia: Perspektif gizi, lingkungan, dan sosial. Scientific Journal, 4(4).

Aris, M., & Lingkar Edukasi Indonesia. (2024). Advokasi kesehatan. Lingkar Edukasi Indonesia.

Arring, O. D., & Winarti, E. (2024). Peran sanitasi sehat dalam pencegahan stunting: Tinjauan literatur berdasarkan health belief model. Jurnal Kesehatan Tambusai, 5(1).

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2018). Laporan nasional Riskesdas 2018. Kementerian Kesehatan RI.

Cahyaningrum, E. D., & Triana, N. Y. (2026). Pemberdayaan kader dan ibu muda melalui edukasi tentang stunting berbasis kearifan lokal. *Jurnal Altifani: Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(2).

Capriani, D., & Rismayana. (2025). Peran tenaga kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di fasilitas pelayanan dasar. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11).

Dewi, K., Anggriani, L., Ritonga, M. P., Azmi, C., Samosir, S. R., & Hutauruk, F. N. (2023). Stunting dan pencegahannya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JUPEMAS),* 1(1).

Fadila, S. N., Salwa, A. N., Hidayanti, D. L., & Zahir, P. I. (2025). Efektivitas pos gizi pada Kelurahan Muncul dalam mengurangi stunting. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2).

Fardiansyah, A., Syurhandari, D. H., Yuniarti, A. H., Saputra, M. H., & Maficha, E. (2022). Konsep dasar manajemen kesehatan. STIKes Majapahit Mojokerto.

Farisni, T. N., Putri, A. S. F., Mellia, W., Paradiba, C. S., Windasuri, Y., & Siaiputri, R. Y. (2025). Imunisasi dan gizi untuk masyarakat sehat: Upaya meningkatkan kualitas hidup di Gla Meunasah Baro, Aceh Besar. *Jannah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3).

Fildzah, F. K., Yamin, A., & Hendrawati, S. (2020). Perilaku ibu dalam pencegahan stunting pada BADUTA. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 5(2).

Fitri, E. S., Mandala, Y., & Rahman, A. C. (2025). Transformasi digital di puskesmas: Peran E-PPGBM dalam mengoptimalkan deteksi masalah gizi di Lombok. *Cakrawala Medika: Journal of Health Sciences*, 4(1).

Fitri, S. R., Paramantya, Y., Sari, P., Ahmad, A., & Safira, F. (2024). Komitmen perangkat desa dalam upaya percepatan penurunan stunting: Studi kualitatif di Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. *Jurnal SAGO Gizi dan Kesehatan,* 6(2).

Gunardi, H. (2021). Optimalisasi 1000 hari pertama kehidupan: Nutrisi, kasih sayang, stimulasi, dan imunisasi merupakan langkah awal mewujudkan generasi penerus yang unggul. *eJKI*, 9(1).

Hutagaol, D. A. L., Siboro, K., & Dalimunthe, S. Y. (2025). Menganalisis peran dan tugas kader posyandu dalam pelaksanaan program pencegahan stunting. *Sport Science and Health*, 7(6).

Hutapea, L. M. N. (2026). Kompetensi dasar kader kesehatan dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia: Tinjauan literatur 2020–2025. *Jurnal Ners*, 10(1).

Imaduddin, Andhika, R., & Abdurrahman, M. (2026). Program dan anggaran pendidikan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran,* 9(1).

Imeldawati, R. (2025). Dampak terjadinya stunting terhadap perkembangan kognitif anak: Literature review. *Jurnal Medika Nusantara*, 3(1).

Istiqamah, N., Aulia, A., & Yeni, H. (2026). Analisis penggunaan sistem informasi kesehatan terhadap kepuasan pelayanan medis di Puskesmas Bambu. *JIMAKUN: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Nusantara*
, 2(1)

Jumarni, J., Suharni, S., Suhra, S., Sudirman, S., & Yani, A. (2026). Literatur review: Pengaruh asupan nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan terhadap risiko stunting. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(1).

Larasati, K. L., Budiono, I., & Handayani, O. W. K. (2025). Evaluasi program promosi kesehatan untuk menurunkan angka stunting di Puskesmas Bandarharjo. *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Indonesia*, 5(1).

Maasawet, G., Bolang, A. S. L., Nelwan, J. E., Pinontoan, O. R., & Rombot, D. V. (2025). Implementasi strategi promosi kesehatan dalam upaya penurunan kejadian stunting di wilayah kerja Puskesmas Talawaan Minahasa Utara. *Jurnal Ners*, 9(3).

Matlilla, M., & Haryati, E. (2024). Faktor-faktor penyebab stunting dan solusi yang diambil oleh Pemerintah Kota Surabaya. *SMIA*, 2(2).

Mulyana, A., Hendra, H., & Retnoningsih. (2025). Implikasi stunting terhadap kemampuan kognitif dan fisik anak usia dini di TK At-Taqwa Teta Lambitu. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2).

Mulyani, A. T., Kharisna, M. A., Khatib, A., & Chaerunisa, A. N. (2025). Understanding stunting: Impact, causes, and strategy to accelerate stunting reduction—A narrative review. *Nutrients*, 17(1).

Nadiasari, Arpandi, & Fahmi, Y. (2026). Efektivitas program pemberian makanan tambahan (PMT) pangan lokal balita gizi kurang di Desa Pandamaan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Al Iidara Balad: Jurnal Administrasi Negara*, 7(2).

Nisa, J. F., & Sumarni, S. (2024). Evaluasi pelaksanaan program pencegahan stunting: Literature review. *Media Gizi Kesmas*, 13(2).

Otaya, L., Anwar, H., & Labaso, S. (2025). Pengukuran dan evaluasi dalam program pendidikan: Tantangan dan solusi kontemporer. *Tahta Media Group*.

Palastri, B. N., & Rosdiana, W. (2026). Literatur review: Evaluasi kebijakan aksi konvergensi dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 3(1).

Priadi, T., & Winarti, E. (2024). Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam implementasi program 1000 hari pertama kehidupan di puskesmas: Pendekatan teori perilaku terencana (theory of planned behavior). *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(1).

Putera, R. E., Purba, S., Mesnan, M., & Siallagan, S. (2026). Strategi manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran di perguruan tinggi. *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 5(2).

Rahman. (2025). Aksesibilitas, ketersediaan tenaga kerja, dan ketersediaan fasilitas pemanfaatan pelayanan kesehatan puskesmas di wilayah pesisir: Literature review. *Jurnal Kendari Kesehatan Masyarakat (JKKM)*, 4(3).

Ramlan, N. (2025). Optimalisasi pemenuhan asupan gizi terpadu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. *Bappenas Working Papers*, 8(8).

Rani, Idrus, K., Asriana, R., Sage, N. H., Mu'minah, S., & Maswati. (2025). Dampak kesehatan dan gizi yang baik pada anak usia dini. *Indonesian Journal of Health and Psychology (IJOHAP),* 1(1).

Roby, G. A., Affrian, R., & Berkatillah, A. (2024). Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa pada Desa Ampukung Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. *Jurnal MSDM: Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1(1).

Rohani, Sugianto, & Husaini, M. (2026). Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan stunting di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Al Iidara Balad: Jurnal Administrasi Negara*, 7(2).

Sarumaha et al. (2026). Pengetahuan ibu tentang gerakan 1000 HPK berhubungan dengan kejadian stunting pada balita.

Situmorang, M. S., Damanik, A. S., & Darmansyah, T. (2025). Efektivitas monitoring dan evaluasi dalam implementasi kebijakan pendidikan: Pendekatan dan tantangan. *Jurnal Arjuna: Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Matematika,* 3(1).

Sugiharto, S., Harsono, Wirawati, M. K., & Iswandari, H. D. (2025). Edukasi stunting dengan pemanfaatan teknologi informasi di Dawis RT.06 RW.11 Tambakaji Ngaliyan Semarang. *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1).

Sutanto, I. A., Salim, M. R., Fattricia, T., Alfarizi, M. D., & Anwar, M. K. (2025). Evaluasi kinerja publik di tengah fenomena galian akhir tahun: Pergeseran paradigma dari serapan anggaran ke capaian nilai publik (Studi kasus Kota Tangerang Selatan). *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 3(4).

Sutiyono, S., Makmun, M., & Kumalasari, N. (2025). Strategi pencegahan stunting dengan intervensi kebijakan publik dan intervensi gizi: Systematic literature review. *Indonesian Journal of Health Community*, 6(2).

Tirta, P., Hasti, R., Laesa, S. C., & Putra, R. P. (2025). Evaluasi indikator kinerja tahun 2023 pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS)/indikator kinerja utama (IKU) dan manual IKU. *Bappenas Working Papers*, 8(3).

Tjiali, W., & Adam, A. (2024). Epistemologi stunting dan pencegahannya. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(4).

Wadi, H., & Maksum, L. (2026). Peran kader kesehatan dalam meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak di wilayah pedesaan. *Journal of Applied Health Sciences*, 2(1).

World Health Organization. (2024, March 1). Malnutrition. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition

Yeyen, Soselisa, P. S., & Pattimukay, H. V. R. (2025). Implementasi kebijakan penanggulangan stunting oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Seram Bagian Barat. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2).

Yuza, A., Putri, A. S. E., & Kasra, K. (2025). Intervensi gizi spesifik terhadap kejadian stunting pada balita. *Jurnal Kesehatan Perintis,* 12(2).

Zahroh, F. L., & Hilmiyati, F. (2024). Indikator keberhasilan dalam evaluasi program pendidikan. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 4(3).